Sibatik Journal
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan
E-ISSN: 2809-8544

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFESIENSI, TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015 – 2021

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: zayn.muzaki99@gmail.com[1], hapsarimega11@gmail.com[2]

Abstract

APBD is an important policy instrument for LGs. The ability to manage APBD reflects the ability to manage finances for local governments in financing operations and development. The research problem includes the partial and simultaneous influence of regional independence ratio variables, effectiveness ratios, and efficiency ratios for capital expenditures in the Tulungagung Regency Government. The purpose of conducting research is to obtain information about the partial and simultaneous effects of the regional independence ratio variable, the effectiveness ratio, and the efficiency ratio for capital expenditure in the Tulungagung Regency Government. The method applied is quantitative with multiple linear regression tests. Secondary type data taken from the website www. djpk.kemenkeu.go.id. The results showed that the independence ratio (X1) was 0.945 > 0.05, the effectiveness ratio (X2) was 0.935 > 0.05, and the efficiency ratio (X3) was 0.258 > 0.05, and the results of the F test were 0.511 > 0.05. This indicates that both partially and simultaneously, all independent variables have no influence on capital expenditure at the Tulungagung Regional Government for the 2015-2021 period with a confidence level of 95.5%.

Keywords: *APBD, Regional Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Capital Expenditures*

Abstrak

APBD ialah instrumen kebijakan penting bagi Pemda. Kemampuan pengelolaan APBD merefleksikan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan operasional serta pembangunannya. Masalah penelitian meliputi pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung. Tujuan dilakukannya penelitian guna mendapatkan informasi tantang pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung. Metode yang diterapkan yaitu kuantitatif dengan uji regresi linier berganda. Data berjenis sekunder yang diambil dari website www. djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian (X1) bernilai 0.945 > 0.05, rasio efektivitas (X2) bernilai 0.935 > 0.05, dan rasio efisiensi (X3) bernilai 0.258 > 0.05, serta hasil uji F yaitu 0.511 > 0.05. Hal ini menandakan bahwa baik secara parsial maupun simultan, keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021 dengan tingkat kepercayaan 95.5%.

Kata Kunci: APBD, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Kemampuan pengelolaan APBD merefleksikan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan operasional serta pembangunan. APBD ialah instrumen kebijakan penting bagi Pemda. Sebab bisa dimanfaatkan untuk belanja daerah terprioritas, sehingga bisa berpotensi mewujudkan pemenuhan kehidupan bagi masyarakat

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

daerah. Belanja modal meliputi belanja modal, operasi, serta seluruh kebutuhan yang tidak terduga.

Pengalokasian anggaran untuk belanja modal yang telah disesuaikan kebutuhan daerah bertujuan menambah asset tetap. Belanja modal umumnya bermanfaat lebih dari 1 tahun anggaran, menambah aset, serta menambah biaya operasional beserta pemeliharaan. Kategori dari belanja modal meliputi belanja gedung dan bangunan, mesin, jalan, irigasi, serta kategori fisik serupa.

Kemandirian daerah didalam sektor keuangan ditandai dengan kemampuan daerah dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui Pendapatan Asli Daerah. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah banyak, maka derah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Hukum ini berlaku kebalikannya. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah sedikit, maka derah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin rendah. Kemandirian keuangan bagi daerah bisa ditingkatkan melalui pemaksimalan PAD, sehingga mampu meminimalisir ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.

Kriteria daerah dengan kategori berkemampuan realisasi PAD efektif bila rasio minimumnya 1%. Bila rasionya bertambah besar, maka kemampuan daerah merealisasikan PAD bertambah efektif. Efisiensi kinerja dari pemerintah dapat dihitung dengan mencari perbandingan pengeluaran dan pendapatan daerah. Daerah dinyatakan efisien bila pengeluarannya kurang dari pendapatan daerah.

Prioritas pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah diketahui melalui penghitungan dengan rasio aktivitas. Belanja rutin serta pembangunan dengan APBD dilatarbelakangi aktivitas pembangunan serta besaran investasi yang disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan mempertahankan serta meningkatkan kontinuitas keberhasilan daerah (pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja rutun dan pembangunan) dapat diidentifikasi melalui penghitungan rasio pertumbuhan. Fungsi mengidentifikasi setiap elemen pendapatan serta pengeluaran yakni memungkinkan daerah lebih memperhatikan seluruh potensi potensial.

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

Grafik 1. Perkembangan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, serta Belanja Modal

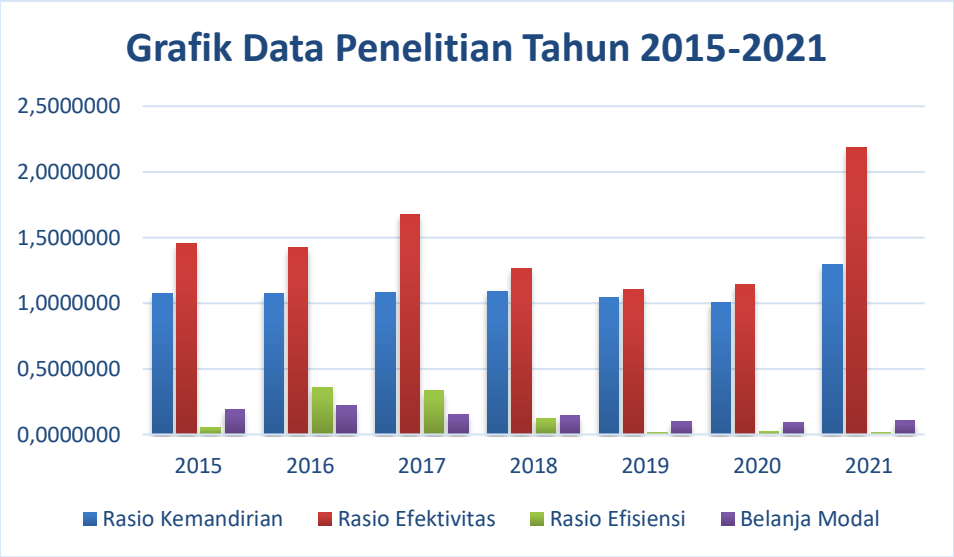

Sumber: www. djpk.kemenkeu.go.id

Pada Grafik 1 terlihat perkembangan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan belanja modal pada periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2015–2018, ketika rasio kemandirian turun maka belanja modal naik dan sebaliknya jika belanja modal turun maka rasio kemandirian naik. Tetapi pada tahun 2019-2021 perkembangan rasio kemandirian dan belanja modal mengalami kesamaan. Pada Grafik 1, perkembangan rasio efektivitas terhadap belanja modal mengalami perbedaan hanya pada tahun 2015-2017. Akan tetapi setelahnya perkembangannya sama-sama turun dan naik lagi pada tahun 2021. Pada tahun 2015-2019, ada kecenderungan ketika rasio efisiensi naik maka belanja modal juga ikut naik dan sebaliknya. Tetapi pada tahun 2019-2021 kecenderungan rasio efisiensi mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan modal belanja yang mengalami penurunan.

Penelitian Silitonga (2009) berjudul "Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara," menyatakan kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh poditif segnifikan bagi belanja modal.

Hidayat (2013) melalui penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)," menyatakan: (1) kinerja keuangan daerah pada tahun sebelumnya mempunyai pengaruh segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun selanjutnya; (2) Ketergantungan tahun sebelumnya mempunyai pengaruh negative segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun selanjutnya; (3) efektivitas PAD, pembayaran SiLPA, serta rasio fiscal di tahun sebelumnya secara parsial mempunyai pengaruh positif segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun selanjutnya.

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

Tujuan penelitian ditetapkan untuk mendapatkan informasi tantang pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda)."

Pada Pasal 50 (c) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan, "belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan."

Belanja modal didalam Permendagri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni, "pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya."

Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pembiayaan dari daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dalan penyediaan layanan bagi masyarakat (Halim, 2001:131). Rasio dari kemandirian merepresentasikan partisipasi dari masyarakat didalam membangun daerah. Tingkat rasio kemandirian yang bertambah tinggi dapat menambah partisipasi dari masyarakat dalam pembayaran pajak serta retribusi yang menjadi elemen penting bagi PAD.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria	Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio efektivitas merepresentasikan kemampuan Pemda untuk mewujudkan sesuatu yang direncanakan dibanding target yang telah diputuskan sesuai potensi daerah. kemampuan dari daerah berkategori efektif bila rasionya minimum 100% (Halim, 2001: 131). Rasio yang bertambah tinggi menandakan semakin efektif. Berikut ialah kategori efektivitas PAD:

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

Tabel 2. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup
60%-80%	Kurang
<60%	Tidak Efkektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio efisiensi ialah rasio yang berfungsi merepresentasikan perbandingan input dengan output ataupun realisasi pengeluaran dengan pendapatan daerah. kinerja keuangan dari pemerintah berkategori efisien bila kurang dari 1 (<100%). Bila rasio berkurang, maka efisiensi bertambah baik (Halim, 2001: 131). Berikut ialah kriteria efisiensi keuangan:

Tabel 3. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang
80%-90%	Cukup
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Hipotesis Penelitian

H_1 : Rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh bagi belanja modal
H_2 : Rasio efektivitas memiliki pengaruh bagi belanja modal
H_3 : Rasio efisiensi memiliki pengaruh bagi belanja modal

METODE

Jenis dari data yang diterapkan berupa kuantitatif, yakni data berbentuk angka. Data bersumber dari data sekunder (seluruh informasi di portal djpk.kemenkeu.go.id). Data penelitian meliputi laporan keuangan (anggaran, pendapatan, dan realisasi APBD) Pemkab Tulungagung. Sampel berjumlah 7.

Variabel operasional yang diputuskan peneliti yakni kinerja keuangan Pemda yang meliputi:

- Belanja Modal

  Ekonomi bagi Pemda dikelompokkan berupa belanja barang, modal, bunga, pegawai, bansos, hibah, serta belanja lain yang tidak terduga. Jenis belanja modal yakni

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

belanja guna mendapatkan tanah, Gedung, alat-alat, serta asset tidak terwujud. Formula belanja modal yakni:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Realisasi\ Total\ Belanja}$$

- Rasio Tigkat Kemandirian Daerah

  Kemandirian keuangan bagi daerah bisa diukur melalui menghitung perbandingan besaran PAD dan penerimaan daerah bersumber lain, meliputi bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK). Formula kemandirian daerah yakni:

$$Rasio\ TKD = \frac{Realisasi\ PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ dan\ Pinjaman}$$

- Rasio Efektivitas

  Rasio efektivitas berfungsi merepresentasikan kemampuan dari pemerintah untuk merelealisasikan seluruh perencanaan dibanding target sesuai potensi daerah. formula rasio efektivitas yakni:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ Ditetapkan}$$

- Rasio Efisiensi

  Rasio ini berfungsi merepresentasikan perbandingan besaran pengeluaran dengan penerimaan daerah. formula rasio efisiensi yakni:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ Daerah}$$

Teknik analisis yang diterapkan yakni analisis kuantitatif, yakni menganalisa data angka yang dihimpun, lalu dianalisa serta disimpulkan. Proses analisis memanfaatkan software SPSS. Statistik yang diaplikasikan yakni: “Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan

a) Rasio Kemandirian

Tabel 4. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (m)	Anggaran Bantuan Pemerintah (m)	Rasio Kemandirian (%)
2015	2.369,74	2.203,17	10,76
2016	2.570,28	2.400,43	10,7
2017	2.598,10	2.405,28	10,80
2018	2.701,55	2.476,07	10,91
2019	2.762,65	2.647,74	10,43
2020	2.598,32	2.583,35	10,06

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

2021	3.095,98	2.394,26	12,93

Sumber: www. Djpk.kemenkeu.go.id

Memperhatikan tabel 4, rerata rasio kemandirian keuangan Pemda Tulungagung periode 7 tahun ialah 10,94%, sehingga sangat rendah. Kontribusi dari PAD bagi APBD relative kecil dibanding dengan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. Dengan demikian Pemda Tulungagung mempunyai ketergantungan dengan pemerintah pusat kategori cukup tinggi, serta belum mampu mencukupi berbagai kebutuhan daerah.

b) Rasio Efektivitas

Tabel 5. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021

Tahun	Target PAD (m)	Realisasi PAD (m)	Rasio Efektivitas (%)
2015	213,01	309,65	145,37
2016	240,48	342,57	142,45
2017	300,12	503,1	167,63
2018	359,28	453,15	126,13
2019	439,53	486,36	110,65
2020	446,58	510,55	114,32
2021	436,04	953,89	218,76

Sumber: www. Djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 5 merepresentasikan perkembangan dari rasio efektivitas Pemda Tulungagung berkategori cukup baik (146,47%) pada periode 2012 hingga 2015. Efektivitas di 2015 yakni 145,37% dengan realisasi penerimaan yang lebih dari targetnya. Efektivitas di 2016 berkurang, yakni 142,45% denngan realisasi penerimaan yang lebih dari targetnya. Efektivitas di 2017 bertambah lagi, yakni 167,63% dengan realisasi penerimaan yang lebih dari targetnya. Efektivitas di 2018 hingga 2020 berkurang lagi, yakni dari 126,13% ke 114,32% dengan realisasi penerimaan yang lebih dari targetnya. Kemudian efektivitas di 2021 bertambah segnifikan, yakni dari 104,44% ke 218,76%. Rerata rasio efektivitas berkategori sangat efektif, tapi realisasi penerimaan menurun.

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

c) Rasio Efisiensi

Tabel 6. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021

Tahun	Realisasi Pengeluaran Daerah (m)	Realisasi Penerimaan Daerah (m)	Rasio Efektivitas (%)
2015	12,92	238,33	5,42
2016	102,72	284,8	36,07
2017	69,27	209,1	33,13
2018	37,50	307,75	12,19
2019	5,00	410,45	1,22
2020	12,94	505,54	2,56
2021	7,00	447,28	1,57

Sumber: www. Djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 6 merepresentasikan rasio efisiensi dari Pemda Tulungagung periode 2015-2021 dikategorikan sudah sangat efisien (13,16%). Kinerja Pemda didalam pemungutan PAD berkategori sangat efisien (tren rasio 60%). Ini menandakan output optimum Pemda bisa didapatkan melalui pengeluaran kecil. Penghematan ini telah sesuai prinsip value for money yang bersifat ekonomis, serta efektif dan efisien.

d) Belanja Modal

Tabel 7. Perhitungan Belanja Modal Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021

Tahun	APBD (m)	Belanja Modal (m)	Belanja Modal (%)
2015	2.317,35	444,59	19,2
2016	2.606,29	574,34	22,0
2017	2.576,15	395,84	15,4
2018	2.576,19	370,66	14,4
2019	2.609,24	247,73	9,5
2020	2.643,65	246,38	9,3
2021	2.753,99	288,29	10,5

Sumber data : data diolah (2017)

Dari perhitungan belanja modal terhadap APBD tahun 2015-2021 masih relatif kecil karena rata-ratanya hanya sebesar 14,32%. Pada tahun 2015 rata-rata nya sebesar 19,2%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 22,0%. Namun, pada tahun setelahnya mengalami penurunan drastic hingga mencapai 10% menjadi 10,5% pada tahun 2021.

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

e) Penyajian Data

Prasyarat dari uji regresi berganda yakni uji asumsi klasik, yakni "uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas."

1. Uji normalitas berfungsi menentukan data dari masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak. Metode pengujian yang diterapkan yakni dengan uji *Kolmogrov Smirnov*. Bila *sig>0,05*, sedemikian sehingga data terdistribusi normal.

Tabel 8. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Test Statistic	.212
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output SPSS 26.0

Memperhatikan table 8, didapatkan informasi bahwa sig.=0.200>0,05. Ini menandakan bahwa data terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas juga direpresentasikan melalui grafik berikut:

Grafik 2. Histogram

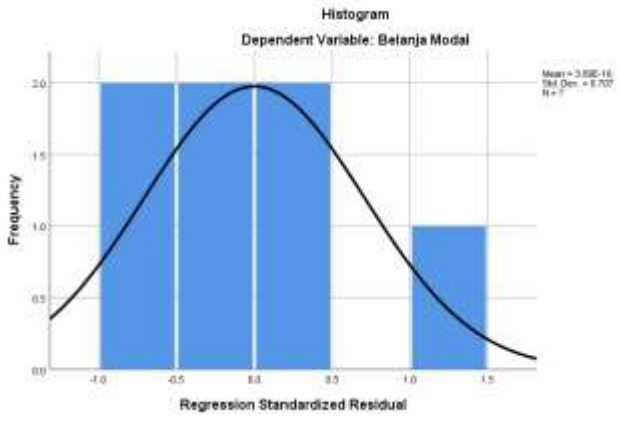

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan grafik 2, didapatkan informasi bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal. Dengan demikian menandakan bahwa data terdistribusi normal.

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

Grafik 3. Normal P-Plot

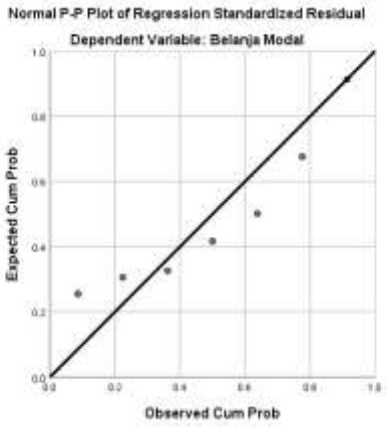

Sumber : Hasil Output SPSS 26.0

Memperhatikan grafik 3, yakni seluruh titik tersebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, menandakan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas, tujuan pengujian multikolinieritas ialah menguji ada atau tidaknya korelasi di setiap variabel bebas. Hasil uji ini berdasar pada VIF serta nilai toleransi. Bila *VIF<10*, dan *nilai toleransi>0,10*, maka dinyatakan terbebas dari multikolinieritas (Priyatno,2012:153).
3.

Tabel 9. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Rasio Kemandirian	.104	9.570
	Rasio Efektivitas	.107	9.360
	Rasio Efisiensi	.623	1.605

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan Table 9 tersebut, didapatkan informasi bahwa nilai *tolerance* seluruh variabel bebas *>10*, dan *VIF>0,10*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas. Dengan demikian model regresinya baik.

4. Uji heteroskedastisitas, tujuan uji ini ialah untuk melihat penyebaran data. Uji yang diterapkan yakni uji grafik *scatter plot* serta uji *spearman's rho*. Berikut ialah grafiknya:

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

Grafik 4. Histogram

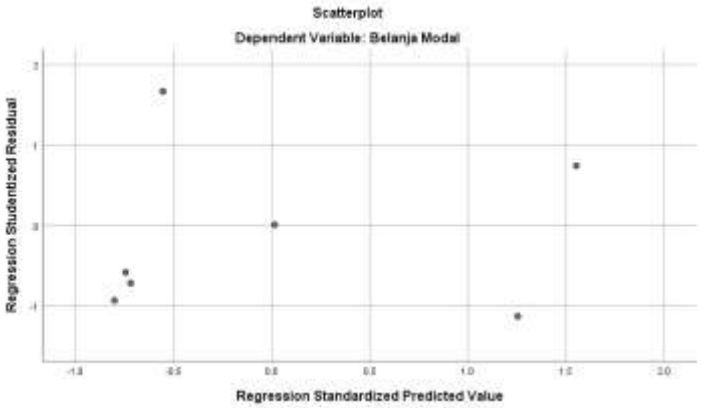

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan grafik 4, seluruh titik tersebar random, tidak berpola, dan peyebarannya diatas serta dibawah angka 0 sumbu Y. ini menandakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Mengingat dan menimbang uji asumsi klasik di atas, sedemikian sehingga seluruh prasyarat uji regresi telah terpenuhi. Berikutnya data diuji regresi berganda untuk mendapatkan informasi ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Hasil uji regresi berganda telah terangkum didalam table 10.

Tabel 10. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	.077	.538	.143	.895
	Rasio Kemandirian	.052	.684	.076	.945
	Rasio Efektivitas	-.015	.166	-.088	.935
	Rasio Efisiensi	.238	.171	1.392	.258

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan tabel 10 tersebut, didapatkan model regresi berikut

$$Y = 0.077 + 0.052X1 - 0.015X2 + 0.238X3 + e$$

Konstanta senilai 0,077. Maknanya yakni (X1), (X2), dan (X3) bernilai 0, maka (Y) bernilai 0,077.

Koefisien (X1) senilai 0,052 dan bernilai positif (ada perubahan searah). Ini berarti bila ada kenaikan rasio kemandirian senilai 1%, (Y) juga ada kenaikan

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

senilai 0,052. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya ialah dengan mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.

Koefisien (X2) senilai -0,015 dan bernilai negatif (ada perubahan berlawanan arah). Ini berarti bila ada kenaikan rasio efektivitas senilai 1%, (Y) ada penurunan senilai 0,015. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya ialah dengan mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.

Koefisien (X3) senilai 0,238 dan bernilai positif (ada perubahan searah). Ini berarti bila ada kenaikan rasio efisiensi senilai 1%, (Y) juga ada kenaikan senilai 0,238. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya ialah dengan mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.

- **Koefisien Determinasi**

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.701[a]	.492	-.017

a. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan table 11, nilai *Adjusted R Square* 0,955. Hal ini dapat diartikan bahwa rasio kemandirian (X1), rasio efektivitas (X2), rasio efisiensi (X3) menjelaskan belanja modal (Y) sebesar 95,5%, sedangkan 4,5% sisanya dijelaskan berbagai variabel lain yang tidak ditetapkan dan dipilih peneliti.

- **Uji t**

Fungsi uji parsial (uji t) ialah menguji pengaruh dari variabel independen pada variabel dependen secara terpisah. Variabel independent dinyatakan memiliki pengaruh segnifikan pada variabel dependen bila *sig<0,05*.

Tabel 12. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	t	Sig.
1	(Constant)	.077	.538	.143	.895
	Rasio Kemandirian	.052	.684	.076	.945
	Rasio Efektivitas	-.015	.166	-.088	.935
	Rasio Efisiensi	.238	.171	1.392	.258

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output SPSS 25.0

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548

a. Pengaruh rasio kemandirian (X1) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = 0,076, signifikansi 0.945. ini menandakan sig>0,05, sehingga bisa disimpulkan rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.
b. Pengaruh rasio efektivitas (X2) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = -0.088, signifikansi 0.935. ini menandakan sig>0,05, sehingga bisa disimpulkan rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.
c. Pengaruh rasio efisiensi (X3) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = 1.392, signifikansi 0.258. ini menandakan sig>0,05, sehingga bisa disimpulkan rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.

- **Uji F**

Uji F berfungsi mengetahui pengaruh simultan variabel bebas pada variabel terikat. Seluruh variabel independent dinyatakan memiliki pengaruh segnifikan pada variabel dependen secara simultan bila *sig<0,05*.

Tabel 13. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		F	Sig.
1	Regression	.967	.511[b]
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan table 13 tersebut, diketahui hasil uji Fhitung 0,967, sig 0.511>0.05. hal tersebut berarti variabel rasio kemandirian (X1), rasio efektivitas (X2), rasio efisiensi (X3) tidak memiliki pengaruh segnifikan pada belanja modal (Y) secara pengujian simultan.

PENUTUP

Kesimpulan

Memperhatikan, mengingat, dan menimbang hasil dari pembahasan, maka disimpulkan yakni:

1. Rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021
2. Rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021
3. Rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021

4. Rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi tidak memiliki pengaruh simultan bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021

Saran

Mempertimbangkan kesimpulan tersebut, saran dar penulis meliputi:

1. Bagi Pemda Tulungagung, perlu memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari sumber daya, pajak serta retribusi daerah, lalu juga mengoptimalkan BUMD (Badan Usaha Milik Desa) agar bisa meminimalisir ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat.
2. Bagi peneliti berikutnya, perlu menambah variabel lain yang berkaitan dengan Belanja Modal, perlu penerapan sampel yang lebih luas, perlu memanfaatkan data periode paling baru.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia, Andi Melisa. 2012. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.

Anjarsetiawan. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (DAU) terhadap Belanja Daerah (Study Kasus pada Provinsi Jawa Tengah).* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang

Ayu Prawesti, S. . (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK INDONESIA. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(10), 2195–2206. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.322

Daniati. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.

Dwi Indah Lestari, A. ., Rahmantullah, I. ., Rizki, J., & Panorama, M. . (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(9), 1681–1692. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.224

Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Hidayat Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).* Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang

Indra Bastian; 2006; *Akuntansi Sektor Publik*: Suatu Pengantar; Jakarta; Erlangga

Kementerian Keuangan RI. 2014. *Deskripsi dan Analisis*.

Madiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi

Marta, Yovita Farah. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Martini Kadek dan Dwiranda. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali*. Jurnal ISSN: 2302- 8556 Universitas Udayana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.

Rengga Viano Deris, L. ., Bhinadi, A. ., & Nuryadin, D. . (2022). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(12), 2947–2958. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.481

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Sadu, Wasistiono. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung*: Fokus Media

Silitonga, Mangindang. 2009. *Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Umatera Utara. Medan

Sularso, Hafid. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Media Riset Akuntansi Vol. 1 No. 2 Agustus 2011.Universitas Jendral Sudirman. Purwokerto.

www.djpk.kemenkeu.go.id (tentang Data APBD Murni, Realisasi APBD per tahun Kab.Tulungagung)

Muh Zainul Muzaki M[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548